

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa relasi kekuasaan yang terbentuk dalam program konservasi berbasis masyarakat di Desa Labuhan Jambu sesuai dengan konsep relasi kekuasaan yang dikemukakan oleh Foucault. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya lima proposisi mengenai kekuasaan mulai dari bagaimana terbentuknya pengetahuan mengenai konservasi di kalangan nelayan tradisional, memudarnya binary opposition yang bertolak belakang antara Conservation International dengan pemahaman nelayan mengenai keberadaan hewan hiu paus sebelum adanya program konservasi serta bersifat intentional dan non subyektif karena kekuasaan terbentuk melalui kesepakatan berorientasi pada kepentingan bersama yang berkaitan dengan tujuan-tujuan konservasi yang objektif.

Namun, dimana ada kekuasaan akan ada pula anti kekuasaan yang muncul dari dalam kekuasaan itu sendiri. *Resistance* ini muncul dari oknum-oknum terkait yang berkaitan dengan permasalahan internal dalam pengelolaan dana konservasi dan cenderung ingin memisahkan diri dari bentuk kelembagaan yang saat ini telah terbangun, dan hal tersebut bisa dipelajari kembali dalam bentuk kajian lain yang sifatnya lebih terfokus

Dalam program pengelolaan konservasi hiu paus di Desa Labuhan jambu, secara umum penulis menemukan bahwa nelayan mendapatkan

keuntungan baik dari segi pengetahuan maupun ekonomi. Berbeda dengan struktur pengelolaan konservasi yang timpang dan dianggap merugikan pihak masyarakat, di sini para nelayan sebagai masyarakat yang paling berkaitan dengan objek konservasi tidak kehilangan akses terhadap sumberdaya yang mereka kelola. Sehingga tidak mengurangi pendapatan dari hasil melaut dan sejauh ini tidak berada pada hubungan yang konfliktual dengan pengelola konservasi yang berada di darat maupun batasan area yang dijadikan wilayah konservasi.

Dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan konservasi, para nelayan juga memiliki akses untuk ikut terlibat dalam perumusan aturan terkait pengelolaan konservasi melalui musyawarah desa yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa. Sehingga, hal tersebut menjadi momen dimana munculnya pengetahuan baru yang berkaitan dengan munculnya kesadaran para nelayan sebagai masyarakat di Labuhan Jambu bahwa wilayah tersebut masih merupakan wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka sebagai kawasan perikanan. Jika dilihat dari keuntungan dan juga akses keterlibatan yang didapatkan oleh nelayan, dapat dikatakan bahwa relasi kekuasaan dalam program pengelolaan konservasi hiu paus di Desa Labuhan Jambu bersifat positif.

Hadirnya program pengelolaan konservasi yang berjalan di Labuhan Jambu muncul dan berkembang seiring dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan kepada masyarakat. Secara perlahan, pengetahuan-

pengetahuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip konservasi masuk dan ikut mengubah peran para nelayan di dalam struktur masyarakat labuhan jambu. Hal yang berubah adalah peranan baru bagi sebagian nelayan yang ikut serta sebagai bagian dari penggiat konservasi, menjadikan mereka bukan hanya sebagai penggiat perikanan namun juga sebagai penggiat konservasi dan pariwisata, dan peranan tersebut bukanlah merupakan sebuah hal yang muncul karena kondisi terpaksa namun tumbuh secara internal melalui kesadaran dan tanpa paksaan.

Meskipun dampaknya belum dirasakan oleh seluruh elemen nelayan yang ada di desa tersebut, namun paling tidak adanya konservasi hiu paus di labuhan jambu tidak menjadikan para nelayan sebagai kelompok yang terusir dari wilayahnya sendiri, dimana mereka masih leluasa memiliki akses terhadap perairan Teluk Saleh sebagai sumberdaya yang menghidupi mereka sehari-hari. Hal tersebut tentunya Berbeda dengan konsep pengelolaan konservasi berbasis kawasan yang bersifat teritorial. Karena, pengelolaan konservasi hiu paus di Desa Labuhan Jambu dilakukan di luar kawasan konservasi dengan cara menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan lokal mengenai manfaat dari tujuan konservasi.

Berdasarkan pada hal tersebut, penulis melihat bagaimana terbentuknya relasi kuasa yang bersifat positif seperti yang dijelaskan oleh Foucault, sehingga relasi yang terbangun merupakan kondisi dimana proses terbentuknya kekuasaan dijalankan dengan cara meminimalisir konflik yang terjadi dalam pengelolaan konservasi. Bukan hanya membentuk

sebuah kekuasaan dalam bentuk wilayah pengelolaan yang bisa diakses oleh masyarakat, namun, munculnya pengetahuan di dalam masyarakat terkait pemanfaatan konservasi, khususnya kalangan nelayan juga terbukti dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam program wisata yang ditujukan untuk konservasi. Khususnya pada hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi.

5.2 Saran dan masukan

Sebagai desa yang menerapkan program konservasi melalui pariwisata berbasis masyarakat, pendekatan wacana yang dilakukan oleh CI terlihat bekerja dengan baik dan bermakna positif bagi para nelayan. Namun, keterlibatan masyarakat khususnya nelayan masih lebih banyak berfokus pada ruang laut. Sementara di sisi lain masih banyak upaya konservasi yang belum dilakukan yang berasal dari darat. Seperti pada pengelolaan dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dan wisata.

Program konservasi yang berjalan pun sebenarnya masih belum didukung oleh semua nelayan yang tinggal di desa tersebut. Karena peranan yang bisa diambil oleh nelayan sangat erat kaitannya dengan kepemilikan atau akses terhadap sumberdaya yang dapat digunakan untuk pariwisata, maka manfaat ekonomi belum bisa dirasakan oleh nelayan-nelayan lain yang tidak memiliki akses tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, bentuk relasi kekuasaan yang berjalan memang bersifat positif dan membawa perubahan secara perlahan dan terstruktur. Namun, keterbatasan peran dan akses yang bisa diambil oleh

nelayan membuat manfaat masih belum dirasakan secara menyeluruh baik untuk individu maupun untuk pengelolaan program konservasi yang dimaksudkan.

Perlu ada mekanisme atau pendekatan dalam bentuk lain yang dapat membantu atau melibatkan para nelayan yang tidak memiliki atau berkaitan

sumberdaya yang bisa dimanfaatkan sebagai aset pariwisata agar bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengarah pada pengawalan tujuan konservasi.

Misalnya dengan cara melakukan pendampingan dan pelatihan terkait tata cara pemantauan kawasan dari kegiatan IUUF, melalui mekanisme pelaporan yang aman untuk dilakukan tanpa menimbulkan konflik horizontal antar nelayan . Begitu juga dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang bisa dilakukan dengan jalan membuat aturan formal atau mekanisme yang bertujuan untuk mendorong para nelayan secara keseluruhan untuk lebih disiplin dalam meminimalisir sampah plastik baik yang ada di sekitaran pesisir maupun yang mereka bawa sebagai perbekalan melaut.

